



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RENCANA KERJA

BADAN PENGHUBUNG DAERAH



20
26



JAMBI
MANTAP
Bersama Membangun Jambi
BERDAYA SAING
BERKELANJUTAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Ranwal Rencana Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Tahun 2026 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat serta perubahan-perubahan Program-program kegiatan yang telah disesuaikan dan akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rencana Kerja (*Performance Plan*) merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2026 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 dan Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 Provinsi Jambi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman menyusun kegiatan prioritas dan sebagai pedoman peningkatan kerja bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Jakarta, Juni 2025
KERALA BADAN,

AMRULSYAH

Pembina IV/a

NIP. 19700107 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	8
2.4. Review Terhadap Renja Perangkat Daerah	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran	22
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	31
BAB V PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	8
Tabel 2.3. Review Terhadap RKPD Tahun 2024	17
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026	19
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029	24
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Jambi	26
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan PD	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Serta untuk menjalankan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada Tahun 2026 yang berkenaan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi perencanaan program dan kegiatan dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebagai arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistimatis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang

pelayanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045.

1.2 Landasan Hukum.

Dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12).
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2026
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026
3. Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2026
4. Kelompok sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026
5. Pagu Indikatif dan Prakiraan maju Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 2026

2. Mengevaluasi RENJA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun sebelumnya
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun sebelumnya
4. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2026
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 juga di evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 meliputi 3 (Tiga) hal, yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan Kegiatan,
2. Pelaksanaan rencana program & kegiatan,
3. Hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 juga memperhatikan hal- hal sebagai berikut ;

- a. Hasil Evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026.
- b. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan RPJMD dan tertuang dalam renstra perangkat daerah.
- c. Prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Jambi dalam memantapkan tata kelola pemerintahan dan memantapkan kualitas sumberdaya manusia.

Tabel 2.1 terlihat bahwa ada relaisasi capaian tahun 2024 kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mendekati dari target yang direncanakan. Untuk IKM realisasi sebesar 83,727% dengan persentase target yang di ditetapkan sebesar 84%. AKIP ditargetkan sebesar 76 dengan predikat (BB) dan realisasi sebesar 70,44 predikat (BB). Pengelolaan

Pendapatan Restribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi capaian sebesar Rp. 1.318.900.000 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.761.419.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan persentase pencapaian 74,88%. Realisasi kegiatan peningkatan Seni Budaya Daerah, Promosi dan Informasi naik sebesar 174,35% dari target 8.652 orang tercapai 15.085 orang kunjungan ke Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	84	83,527	99,44	84	83,727	99,67	86
	Predikat AKIP	BB	BB	BB	76 (BB)	70,44 (BB)	92,68	A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Predikat AKIP	BB	BB	BB	76 (BB)	70,44 (BB)	92,68	A
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kontribusi Mess Jambi/PAD (Rp.000)	1.319.800	904.800	68.56	1.761.419	1.318.900	74,88	3.696.296
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM	84	83,527	99,44	84	83,727	99,67	86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IKM	84	83,527	99,44	84	83,727	99,67	86
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat AKIP	BB	BB	BB	76 (BB)	70,44 (BB)	92,68	A
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah di Jakarta	IKM	84	83,527	99,44	84	83,727	99,67	86
Program Fasilitasi Hubungan Daerah, Lembaga dan Masyarakat	IKM	84	83,527	99,44	84	83,727	99,67	86

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kunjungan Wisata ke Anjungan Jambi TMII (orang)	7210	16467	228,39	8652	15085	174,35	8346
Program Pelayanan Penghubung	Meningkatkan Retribusi Daerah dan Jumlah Kunjungan (Rp.000)	1.319.800	904.800	68.56	1.761.419	1.318.900	74,88	3.696.296
	Meningkatnya Seni Budaya Daerah, Promosi dan Informasi (orang)	7210	16467	228,39	8652	15085	174,35	8346

Sumber : Bapedaprovjambi. 2025.Data Diolah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan pelayanan. Pencapaian kinerja indikator perangkat daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Mess Pemerintah Daerah di Jakarta berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi Jasa Usaha juga berperan sebagai tempat menginap selama berada di Jakarta baik untuk melaksanakan kedinasan maupun kegiatan diluar kedinasan yang sangat membantu dalam menjalankan aktifitasnya di Jakarta dan menuju daerah lain. Fasilitas yang ada di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi cukup lengkap terlihat dari jumlah kamar yang tersedia, kesediaan kendaraan dalam mendukung mobilisasi menuju tujuan dari kegiatan yang

dilaksanakan

Jumlah Pendapatan Daerah dari Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan dan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Jakarta pada tahun 2024, target penerimaan sebesar Rp. 1.761.419.000,- sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp.1.318.900.000,- artinya realisasi target baru tercapai 74,88 %.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pelayanan pimpinan dan hubungan antar Lembaga	Nilai IKM Layanan Pimpinan	83.3	84	84	86	83,527	83,727	85.5	86
2.	Meningkatnya Promosi Seni Budaya pada Instansi/Lemba ga Pemerintah Daerah yang melayani Publik	Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata Keanjungan Jambi TMII	3500	3605	7210	8346	16.467	15.085	7949	8346
3.	Meningkatkan Pelayanan Publik Pendapatan Mess Jambi/PAD	IKM	83.3	84	84	86	83,527	83,727	85.5	86
		Jumlah Peningkatan kontribusi Mess Jambi/PAD (Rupiah/Milyar)	2.567.000	2.693.000	3.193.000	3.696.296	904.800.000	1.318.900.000	3.520.282	3.696.296
4.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat AKIP	B	B	BB	A	BB	BB	A	A

Sumber : Bapegdaprovjambi.2025.Data Diolah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur,

penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi masih terdapat kendala dan hambatan antara lain :

- a. Rendahnya capaian target retribusi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi disebabkan karena penginapan/hotel yang berada di sekitar yang memiliki fasilitas yang memiliki nilai jual lebih tinggi, harga yang kompetitif. Standar akomodasi yang ditetapkan dalam anggaran perjalanan dinas yang menggunakan dana APBD yang berbeda cukup tinggi sehingga menjadi pilihan dalam menginap
- b. Sinkronisasi dan sinergisitas kegiatan Promosi Budaya Daerah yang belum optimal di lintas kabupaten/kota se Provinsi Jambi untuk promosi ditingkat nasional berbasis digital.
- c. Sarana dan Prasarana yang berbasis teknologi tinggi atau digitalisasi yang belum tersedia/terpenuhi secara maksimal
- d. Kompetensi dan ketrampilan sumberdaya manusia yang belum memiliki sertifikasi baik itu formal maupun non formal.
- e. Budaya kerja aparatur Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang belum berbasis kinerja.

Mengamanatkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fasilitasi Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya, menyelenggarakan Protokoler, Promosi Daerah serta pembinaan

paguyuban masyarakat daerah dimana tugas pokok, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga Pemerintah dan Swasta;
- c. Membantu Gubernur dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya misi diplomatik dan instansi lainnya;
- d. Melaksanakan pelayanan protokoler pejabat pemerintah daerah dan tamu daerah di Jakarta;
- e. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah;
- f. Memberikan pelayanan data dan informasi tentang Jambi kepada yang memerlukannya;
- g. Melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Jambi di Tingkat Nasional dan Internasional
- h. Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama dengan paguyuban masyarakat dan Mahasiswa Jambi di Jakarta dan sekitarnya;
- i. Koordinasi pengelolaan Anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- j. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan Keuangan kantor .
- k. Mengelola mess Pemerintah Provinsi-Jambi di Jakarta .
- l. Mengelola asset pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta.

Berdasarkan fungsi tersebut diatas, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

- a. Penghubung antar pemerintah daerah dengan pemerintah, lembaga pemerintah non departemen dan swasta di Jakarta;
- b. Pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi/luar daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;

- d. Pengadaan kegiatan promosi, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. Pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- f. Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) berupa Mess di Jalan Cidurian no. 15-17 Cikini, dan Asrama Mahasiswa Jambi di Sentiong Kwitang Jakarta Pusat.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 disamping mempunyai seorang Kepala Badan, juga membawahi 4 (empat) sub unit eselon IV.a yang terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kasubbag Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi tata naskah dinas, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian surat menyurat dan pengadaan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi kenaikan pangkat, pelatihan, disiplin pegawai ASN, mutasi, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan dan asuransi pensiun (TASPEN) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. Pelaksanaan evaluasi kehadiran dan penilaian kinerja dalam pemberian tunjangan;
- d. Pengusulan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan pegawai ASN;
- e. Pembuatan daftar urut kepangkatan;
- f. Pembuatan data base pegawai sesuai administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- g. Perencanaan urusan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- h. Perencanaan dan pengelolaan perpustakaan;
- i. Pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengevaluasi program kerja;

- j. Pemantauan dan pengambilan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan;
- k. Pelaksanaan dan penyiapan laporan dan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha dan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Mess dan Aset

Kasubbid Pengelolaan Mess dan Aset mempunyai tugas pokok mengelola mess Jambi dan aset pemerintah provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengevaluasi standar operasional pelayanan mess dan aset pemerintah Provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- b. Penata dan penginventarisir sarana dan prasarana mess dan aset pemerintah Provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengambil langkah-langkah pelaksanaan pemeliharaan mess dan aset pemerintah Provinsi di di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- d. Pelaksanaan urusan promosi mess Jambi, peningkatan pelayanan dengan sistem pelaporan penerimaan mess dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga

Kasubbid Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang keprotokolan, kehumasan, akomodasi, transportasi, hubungan antar lembaga pemerintah provinsi, lembaga-lembaga pemerintah departemen/non departemen,

swasta dan internasional serta pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/luar daerah yang berkaitan dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan program kerja kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi serta hubungan antar lembaga;
- b. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi serta hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- e. Pengurusan, penyiapan kelengkapan administrasi dan perjalanan gubernur, wakil gubernur, ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan sekretaris daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi mengenai hubungan kerja yang sedang dan akan dilaksanakan antara pemerintah provinsi dengan lembaga pemerintah (lembaga-lembaga pemerintah departemen dan non-departemen), swasta dan internasional;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
- h. Pemberian bantuan kepada para pejabat pemerintah provinsi dalam rangka hubungan kerja dengan pemerintah (lembaga-lembaga pemerintah departemen dan non-departemen), swasta dan internasional di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- i. Pengumpulan dan pengelola data atau informasi tentang masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya

Kasubbid Promosi Informasi dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bidang Promosi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi untuk melakukan kegiatan promosi pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata baik di dalam dan di luar taman mini Indonesia indah;
- d. Pengkoordinasi kegiatan anjungan Jambi dan Taman Mini Indonesia Indah;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi, meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata baik di dalam dan di luar Taman Mini Indonesia Indah;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan program dan informasi pembangunan daerah serta pengelolaan anjungan Jambi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pada RENJA Tahun 2024, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melalui APBD Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 untuk 2 Program, 7 Kegiatan dan 18 sub kegiatan, dengan total pagu murni Rp 14.649.303.574,00 (empat belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah),

Realisasi keuangan s/d 31 Desember 2024 sebesar Rp.13.924.622.945,00 (95,05%), persentase fisik 100 persen, sisa anggaran yang tidak diserap Rp 724.680.629,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). Sisa anggaran yang tidak terserap dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan perangkat daerah sebesar Rp. 446.888.530,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) karena ada 1 (satu) pegawai yang pindah tugas ke Kabupaten Bogor, kegiatan administrasi umum dan perangkat daerah dengan sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 66.160.400,00 (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) merupakan efisiensi dari kegiatan fasilitasi pelayanan tamu VVIP yang dikarenakan jumlah yang terfasilitasi berkurang pada tahun 2023. Untuk sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp. 137.330.754,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh lima puluh empat rupiah) merupakan kegiatan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk gedung Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang beralamat Jl. Cidurian no 15 – 17 Cikini. Tidak terserapnya anggaran ini di karena total jumlah pajak PBB sebesar Rp. 149.307.266,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah

Perintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Artinya bahwa untuk pembayaran PBB masih kekurangan dana sebesar Rp. 11.976.512,-, maka anggaran untuk pembayaran PBB tidak biasa di bayarkan. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi telah memberikan surat kepada Dipenda Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk bisa membayar sesuai anggaran yang ada dengan nomor surat: S. 900/213/Bapegdaprov. 1/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024, perihal Permohonan Kajian Ulang Pembayaran PBB Gedung. Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah sudah menyampaikan balasan atas surat yang disampaikan dengan nomor surat : 4010/10.02.01, tanggal 18 Desember 2024 perihal : Penjelasan Permohonan Kajian Ulang Pembayaran PBB Gedung. Dalam penjelasan disampaikan bahwa pembayaran pajak PBB Gedung Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sesuai ketentuan yang tertera pada ketetapan (SPPT PBB-P2).

Pada rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 telah dilakukan review mengenai realisasi anggaran sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses kebutuhan dan target kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2026 yang pada tahun sebelumnya tidak teranggarkan.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta	Predikat AKIP	BB	27.099.056.812	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta	Predikat AKIP	B	20.463.323.000	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	15 dokumen	22.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	15 dokumen	21.287.500	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	10.070.583.686	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	7.847.367.827	
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	100%	516.446.700	Administrasi Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	100%	205.500.000	
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	100%	150.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	100%	150.700.000	
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian	100%	3.457.988.871	Administrasi Umum Perangkat	Jakarta	Persentase penyelesaian	100%	3.167.509.563	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pelayanan administrasi umum			Daerah		pelayanan administrasi umum			
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	310.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.635.378.500	
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	2.785.008.653	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	3.169.682.310	
1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	1.029.086.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	4.265.897.300	
2.	II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Persentase Pelayanan Penghubung yang Optimal	100%	499.403.240	II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Persentase Pelayanan Penghubung yang Optimal	100%	1.579.642.000	
2.1.	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah Pelayanan yang	100%	499.403.240	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan	100%	1.579.642.000	

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dilaksanakan								

Sumber : Bapegdaprovjambi.2025 Data Diolah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan. Pelaksanaan program sebagai upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program dan kegiatan Badan Penghubung untuk Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Pembangunan sesuai dengan Ranwal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta	NILAI SAKIP	17.653.431.559	
			Persentase Peningkatan target Penerimaan Retribusi		
1.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang difasilitasi	7.475.613.827	
1.2.	Administrasi Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase Penataan Administrasi BMD	207.900.00	
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase layanan administrasi Kepegawaian	63.140.000	
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	2.475.374.969	
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	831.657.086	
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi	3.080.858.220	
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jakarta	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3.518.887.457	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah		terpenuhi		
2.	II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	IKM Layanan Penghubung	962.859.860	
2.1.	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Persentase Peningkatan Layanan Penghubung	962.859.860	
			Persentase layanan promosi seni budaya		
			Persentase Fasilitasi Pelayanan Pimpinan		

Sumber : Bapegdaprovjambi.2025 Data Diolah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029 merupakan rencana pembangunan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah 2025-2045, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2029, harus berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi.

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Di tengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, resposif dan partisipatif, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat. Dalam kaitan ini, birokrasi juga memiliki peranan dalam penciptaan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pilar penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan bidang aparatur negara tidak dapat dilepaskan dan harus merujuk pada landasan ideologis dan konstitusional negara yakni Pancasila dan UUD 1945.

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2025 – 2045, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu “Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan

Nasional Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah difokuskan pada implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan agar dapat memenuhi harapan masyarakat; pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional; penerapan standar pelayanan pada seluruh penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Berangkat dari Misi 1 (satu) dari 3 (tiga) Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, yaitu : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”, maka tujuan pembangunan daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diambil dari Tujuan 1 (satu) dari 3 (tiga) Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis” dengan demikian tujuan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 adalah :

Terwujudnya capaian kinerja layanan penghubung.

Sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 adalah sasaran 1 (satu) dari 11 (sebelas) sasaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 -2029, yaitu :

Terwujudnya Lembaga yang Melayani dan Berbasis Digital.

Dengan demikian sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah: **Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung.** Dari sasaran tersebut maka diturunkan dalam indikator sasaran yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat adalah nilai indeks dari hasil survey terhadap kepuasan dari responden yang menginap di mess Jambi sesuai dengan Permenpan nomor 14 tahun 2017.

2. Persentase Pelayanan Penghubung yang optimal

Pengukuran persentase ini dilakukan dengan indikator jumlah kunjungan ke anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia, Jumlah pelayanan terhadap pimpinan yang difasilitasi dan dilakukan ke Kementerian dan Lembaga serta jumlah responden yang menginap Mess Jambi.

3. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan kategori reformasi dengan yang kategorikan dalam huruf berupa : AA, A, BB, B, CC, C dan D

4. Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi

Persentase peningkatan realisasi penerimaan retribusi adalah target realisasi tahun berjalan dikurangi target realisasi tahun sebelumnya dibagi target realisasi tahun sebelumnya.

5. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah

Hasil monev merupakan hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Untuk jelasnya Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -	
						2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Lembaga yang melayani dan berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya kualitas layanan penghubung	IKM Layanan Penghubung	83,7	83,8	84
				Persentase Pelayanan Penghubung yang optimal	66,7	71,7	75,7
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,4	70,7	70,75
				Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi	33,5	14,4	14,8
				Hasil monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	8	70,01	71

Sumber : Bapegdaprovjambi.2025 Data Diolah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2026, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tetap mengacu pada Ranwal Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029.

Keseluruhan program maupun kegiatan diupayakan untuk mengakomodir pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 62 Tahun 2016 fokus pada aspek Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta, membina hubungan masyarakat, pelajar/mahasiswa Jambi yang berada di Jakarta dan melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Jambi di Tingkat Nasional dan Internasional serta mengelola mess Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta. Oleh karena itu program maupun kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan program/kegiatan prioritas yang telah disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Ranwal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, seperti tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Jambi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Jakarta	75	17.653.431.559	APBD		75	21.438.323.495
		Persentase Peningkatan Target Penerimaan Retribusi		48%				48%	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang difasilitasi	Jakarta	100%	7.475.613.827	APBD		100%	8.483.990.540
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	14 dokumen	7.102.985.027	APBD		14 dokumen	8.018.262.284
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jakarta	12 dokumen	372.628.800	APBD		12 dokumen	465.728.256
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Penataan Administrasi BMD	Jakarta	100%	207.900.000	APBD		100%	232.848.000
5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jakarta	2 dokumen	207.900.000	APBD		2 dokumen	232.848.000
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Kepegawaian	Jakarta	100%	63.140.000	APBD		100%	136.505.600
5.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket	Jakarta	110	63.140.000	APBD		115 paket	81.065.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		paket					
5.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta	12 orang	-	APBD		12 orang	55.440.000
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	Jakarta	100%	2.475.374.969	APBD		100%	2.820.803.961
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jakarta	13 Paket	48.762.950	APBD		13 Paket	54.614.504
5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jakarta	44 Paket	385.861.664	APBD		44 Paket	432.165.059
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jakarta	300 Paket	492.631.200	APBD		300 Paket	600.130.944
5.07.07.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta	25 Paket	48.119.155	APBD		25 Paket	53.893.454
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	950 Laporan	1.500.000.000	APBD		950 Laporan	1.680.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	Jakarta	100%	831.657.086	APBD		100%	2.264.255.936
5.07.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jakarta	1 Unit	310.000.000	APBD		3 Unit	1.680.000.000
5.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jakarta	10 Paket	88.555.000	APBD		10 Paket	99.181.600
5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta	39 Unit	433.102.086	APBD		39 Unit	485.074.336
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi	Jakarta	100%	3.080.858.220	APBD		100%	3.461.997.506
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	13 Laporan	89.454.400	APBD		13 Laporan	14.857.228
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	12 Laporan	1.564.018.600	APBD		12 Laporan	1.800.084.832

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		yang Disediakan							
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perelatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	13 Laporan	101.754.608	APBD		13 Laporan	113.965.161
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jakarta	30 laporan	1.325.630.612	APBD		20 bulan	1.533.090.285
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah terpenuhi	Jakarta	100%	3.518.887.457	APBD		100%	4.037.921.952
5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta	23 unit	1.146.918.400	APBD		23 unit	1.332.932.608
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta	5 unit	843.065.100	APBD		5 unit	944.232.912
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jakarta	4 unit	1.528.903.957	APBD		4 unit	1.760.756.432

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.07.02	II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	IKM Layanan Penghubung	Jakarta	86	962.859.860	APBD		86	1.141.322.094
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Peningkatan Layanan Penghubung	Jakarta	100%	962.859.860	APBD		100%	1.141.322.09
		Persentase layanan promosi seni budaya	Jakarta	100%				100%	
		Persentase Fasilitasi Pelayanan Pimpinan	Jakarta	100%				100%	
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	2 Laporan	160.250.600	APBD		5 Laporan	179.480.672
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pimpinan	Jakarta	20 Kali				20 Kali	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang ditingkatkan	Jakarta	20 Laporan	802.609.260	APBD		20 Laporan	961.841.422
					18.616.291.419				22.579.645.589

Sumber : Bapegdaprovjambi.2025. Data Diolah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Badan Penghubung Daerah tidak dapat terpisah dari dokumen Rencana Strategis yang dimiliki. Dokumen ini menjadi acuan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya. Sesuai Ranwal Renstra Badan Penghubung Daerah Tahun 2025 – 2029, untuk tahun 2026 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH						18.616.291.419,00							22.579.645.589,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						962.859.860,00							1.141.322.094,00		
	5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG						962.859.860,00							1.141.322.094,00		
1.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase pelayanan penghubung yang Optimal	-			100 %	962.859.860,00						-	1.141.322.094,00		
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Optimal	-			100 persen	962.859.860,00						-	1.141.322.094,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat															
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				5 Laporan	160.250.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.480.672,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				20 Laporan	802.609.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		961.841.422,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	X	NON URUSAN						17.653.431.559,00							21.438.323.495,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						17.653.431.559,00							21.438.323.495,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	-			BB Predikat	17.653.431.559,00						-	21.438.323.495,00		
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	-			100 persen	7.475.613.827,00						-	8.483.990.540,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	7.102.985.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.018.262.284,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	372.628.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		465.728.256,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	-			100 % 100 persen	207.900.000,00			-	-	-	-	232.848.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	207.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		232.848.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	-			100 % 100 persen	63.140.000,00			-	-	-	-	136.505.600,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	63.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.065.600,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.440.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	-			100 % 100 persen	2.475.374.969,00			-	-	-	-	2.820.803.961,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	48.762.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.614.504,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	385.861.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		432.165.059,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	492.631.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.130.944,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	48.119.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.893.454,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				950 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.680.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	831.657.086,00			-	-	-	-	2.264.255.936,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.680.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	88.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.181.600,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				39 Unit	433.102.086,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		485.074.336,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	-			100 persen 100 %	3.080.858.220,00			-	-	-	-	3.461.997.506,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13 Laporan	89.454.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.857.228,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.564.018.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.800.084.832,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	101.754.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		113.965.161,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	1.325.630.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.533.090.285,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	-				100 persen 100 %	3.518.887.457,00			-	-	-		4.037.921.952,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	1.146.918.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.332.932.608,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	843.065.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		944.232.912,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.528.903.957,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.760.756.432,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
J U M L A H								18.616.291.419,00							22.579.645.589,00	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan yang merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Ranwal Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah, target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026.

Rencana Kerja ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja 2026 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari perwujudan tujuan dan sasaran Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.